



## **SAMBUTAN**

### **MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

#### **PADA PEMBUKAAN RAPAT KOORDINASI NASIONAL GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (GT PP-TPPO)**

***"Bersama Kita Berantas TPPO Melalui Peningkatan Kapasitas SDM,  
Pemberdayaan, Partisipasi Masyarakat dan Peningkatan Layanan Publik di  
Pusat dan Daerah"***

**Aston Kupang Hotel & Convention Centre – Kupang, 15 Oktober 2019**

Yang saya hormati

- Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Jajaran
- Deputi Bidang Koordinasi Perlindungan Perempuan dan Anak, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, selaku Ketua GT PP-TPPO Pusat, dan jajaran
- Anggota Gugus Tugas PP-TPPO Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia
- Para pejabat Eselon I Kementerian PP-PA dan jajaran
- Para mitra kerja Gugus Tugas PP-TPPO
- Para Narasumber, Fasilitator, Undangan dan hadirin yang berbahagia.

**Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh,  
Shalom,  
Om Swastiastu, Salam Kebajikan, Namu Budaya  
Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua,**

Puji dan syukur kepada Tuhan YME, saat ini kita dapat dipertemukan dalam kondisi sehat di Kota Kupang.

Pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan ucapan terima kasih atas perkenan Bapak/Ibu untuk hadir pada Rapat Koordinasi Nasional Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Tahun 2019 ini. Secara khusus, kami menyampaikan terima kasih pada Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang dengan tangan terbuka bersedia menjadi tuan rumah yang sangat baik bagi seluruh peserta Rakornas.

***Bapak/Ibu Hadirin yang saya hormati,***

Kami memilih tema “Mari Bersama Kita Berantas TPPO” dalam Rakornas Gugus Tugas ini dengan dasar pemikiran bahwa Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah kejahatan kemanusiaan yang sangat kompleks, dengan akar penyebab masalah yang kompleks pula, modus serta cara yang digunakan sangat beragam dan terus berkembang, serta melibatkan sindikasi sebagai pelakunya.

Oleh sebab itu, untuk memberantas TPPO dari hulu sampai hilir di Indonesia memerlukan ‘kerja bersama’ yang harmonis dan sinergis dari para pihak terkait, mulai dari keluarga, masyarakat, lembaga pendidikan, dunia usaha, lembaga masyarakat, dan lembaga pemerintah di tingkat desa, kabupaten/kota, provinsi, dan pusat. SINERGITAS kebijakan, program dan kegiatan di semua lini yang memiliki daya ungkit tinggi tersebut diperlukan untuk menghapuskan faktor penyebab TPPO yang sangat kompleks, seperti diuraikan di atas. Demikian juga disaat terjadi korban TPPO, penanganannya tidak dapat diserahkan hanya pada satu pihak saja, diperlukan kolaborasi, koordinasi, dan aksi bersama sebagai sebuah tim untuk dapat melindungi/memberikan hak-hak korban dan saksi, serta penegakan hukum bagi pelaku.

***Bapak/Ibu Hadirin yang saya hormati,***

Kerja bersama yang sinergis dan harmonis tersebut sesuai dengan semangat yang tercantum dalam UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO, Perpres No. 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pemberantasan TPPO, dan PP No. 9 Tahun 2008 tentang Pelayanan Terpadu Penanganan Saksi dan atau Korban TPPO.

Sebelas tahun pelaksanaan perundang-undangan tersebut berbagai kemajuan telah dicapai dan berbagai tantangan masih dihadapi. Berdasarkan Laporan Kinerja Gugus Tugas PP-TPPO Tahun 2018, Indonesia masih merupakan negara pengirim atau negara penerima, tetapi juga negara transit perdagangan orang. Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagian besar dialami oleh perempuan dan anak.

Salah satu tantangan dan permasalahan utama dalam pemberantasan TPPO adalah terletak pada kondisi Gugus Tugas yang dimandatkan oleh UU No. 21 Tahun 2007 dan Perpres No. 69 Tahun 2008 untuk mengefektifkan upaya pencegahan dan penanganan TPPO. Komitmen anggota GT PPTPPO di pusat dan daerah masih kurang dan beragam. Begitu pula dengan *leadership* atau kepemimpinan di dalam GT di berbagai tingkatan sehingga kerja gugus tugas kurang optimal. Selain itu, upaya pencegahan TPPO di tingkat akar rumput (keluarga, masyarakat, dan desa) belum berjalan. Permasalahan ini mengakibatkan kerja bersama yg harmonis, sinergis, dan terintegrasi dalam upaya pencegahan dan penanganan TPPO kurang berjalan sebagaimana diharapkan.

Untuk itu menjawab tantangan dan permasalahan tersebut, kinerja Gugus Tugas PPTPPO diberbagai tingkatan harus ditingkatkan. Dengan demikian diharapkan kita dapat mewujudkan sasaran pembangunan nasional, yaitu meningkatkan perlindungan bagi perempuan dari berbagai tindak kekerasan, termasuk TPPO, yang ditandai dengan meningkatnya upaya-upaya pencegahan, efektivitas pelayanan, serta pemberdayaan korban. Sekaligus berkontribusi dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya Tujuan ke-5.

***Bapak/Ibu Hadirin yang saya hormati,***

Sinergi adalah perbedaan bukan persamaan. Sinergitas akan membangun kerjasama-kerjasama kreatif dengan cara menghormati dan memahami perbedaan tugas, fungsi dan peran masing-masing pihak. Untuk itu, para pihak yang terkait harus memiliki interaksi yang berkelanjutan, saling terbuka, memiliki pemahaman dan visi yang sama, dan mengedepankan dialog dalam segala hal. Melalui proses interaksi reguler ini diharapkan muncul ide-ide kreatif dan inovatif. Rakornas Gugus Tugas PP TPPO ini adalah salah satu upaya kami, selaku Ketua Harian sekaligus Sekretariat Gugus Tugas PPTPPO tingkat pusat, untuk memfasilitasi interaksi tersebut.

Untuk itu, Rakornas kali ini didisain untuk berbagi informasi tentang kebijakan-kebijakan dan membahas isu-isu terbaru yang muncul dalam PPTPPO, evaluasi kelembagaan Gugus Tugas PPTPPO, membahas rincian modus-modus TPPO terkini dan langkah strategis pencegahan dan penanganannya, serta mencari solusi bersama yang diperlukan untuk mengatasi berbagai tantangan yang ada.

Tentunya sinergitas dan sinkronisasi PPTPPO dapat tercapai jika semua pihak juga sepakat untuk meningkatkan pencatatan dan pelaporan kasus TPPO melalui suatu system database yang terintegrasi antar K/L dan pusat-daerah untuk dapat menghasilkan data kasus TPPO yang lebih komprehensif, dapat

dipertanggungjawabkan, faktual, dan *real time*. Kementerian PP-PA dan Gugus Tugas Pusat sedang merencanakan integrasi pengelolaan data kasus TPPO tersebut melalui Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) yang berbasis data layanan di pusat dan daerah, dengan menyempurnakan aplikasi data TPPO yang ada didalamnya. Selain menghasilkan data kasus yang lebih komprehensif dan bermanfaat untuk penyempurnaan kebijakan PPTPPO, Simfoni tersebut juga direncanakan dapat memantau layanan yang diberikan oleh para pihak bagi saksi dan atau korban TPPO.

Penanganan kasus-kasus TPPO melalui aksi bersama yang sinergis antara anggota Gugus Tugas PP-TPPO (pusat dan daerah) terus ditingkatkan. Pada tahun 2019 ini Gugus Tugas antara lain telah berhasil memulangkan puluhan perempuan yang di *trafficking* ke Tiongkok dengan modus pengantin pesanan, penangkapan jaringan besar pelaku *trafficking* dengan modus pekerja migran ke negara Timur Tengah, penangkapan pelaku *trafficking* dengan modus pemberian beasiswa ke luar negeri, penangkapan pelaku *trafficking* untuk tujuan eksploitasi seksual antar provinsi atau di dalam wilayah tertentu di Indonesia yang korbannya sebagian masih usia anak.

Secara simultan, peningkatan kualitas pelayanan dan penanganan kasus-kasus TPPO melalui Gugus Tugas PP-TPPO terus diupayakan melalui pelatihan-pelatihan bagi anggota Gugus Tugas, Satgas, Komunitas, masyarakat luas, dan Aparat Penegak Hukum di berbagai lini, mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemenuhan hak korban dan saksi. Kami berkeyakinan bahwa peningkatan dan integrasi data, penguatan kapasitas kelembagaan perlindungan perempuan serta organisasi masyarakat dan Aparat Penegak Hukum, dapat mengoptimalkan upaya penanganan dan perlindungan korban.

### ***Bapak Ibu dan Hadirin yang saya hormati,***

Walaupun sudah banyak kebijakan yang dihasilkan terkait TPPO, namun diakui masih terdapat tantangan dalam implementasinya. Tantangan tersebut baik dari sisi pencegahan maupun perlindungan korban dan penegakan hukum bagi pelaku kekerasan, khususnya TPPO yang belum dipahami secara menyeluruh. Tantangan tersebut antara lain masih beragamnya pemahaman, kapasitas dan kapabilitas para pengampu di daerah dalam pendataan dan penanganan kekerasan berbasis gender, dan masih beragamnya komitmen pemerintah daerah dalam menyediakan layanan dasar.

Saya percaya bahwa isu-isu tersebut merupakan hal yang sangat penting untuk diselesaikan. Kita seyogyanya dapat membangun dan memperkuat kerjasama dalam rangka pencegahan, penanganan dan pemberdayaan korban kekerasan berbasis gender, termasuk TPPO. Untuk menghadapi semakin beragamnya modus-modus baru dalam TPPO, kami meyakini pentingnya meningkatkan *sharing best practices, knowledge* dan upaya lintas bidang di tingkat nasional dalam penghapusan TPPO. Selain itu, pentingnya replikasi sejumlah *lessons learned* yang telah terbukti efektif dalam pencegahan dan penanganan TPPO.

Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Dengan mengucapkan syukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa, bersama ini kegiatan "Rapat Koordinasi Nasional Gugus Tugas Pencegahan Dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Tahun 2019" secara resmi saya buka. Selamat mengikuti kegiatan Rakornas ini dan ijin saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber, fasilitator, peserta, panitia (pusat dan daerah), serta pihak-pihak lain yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah berkontribusi di dalam menyukseskan acara kita hari ini dan dua hari ke depan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa dapat membalasnya.

Terima kasih.

**Wabillahi taufik wal hidayah, Wassalamu`alaikum warrohmatullahi wabarakatuh**

Kupang, 15 Oktober 2019

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan  
Perlindungan Anak

**Prof. DR. Yohana Susana Yembise, Dip. Apling, MA**